



PERBANDINGAN PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH KOTA CIMAH I DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dewi Kurniasih¹, Deviana Indah Harini²

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Bandung
Email Korespondensi: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Abstrak

Citra buruk tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah membawa kita pada suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi. Salah satu isu sentral yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah gagasan Good dan Clean Government. Penelitian ini menggunakan teori good and clean government dari Sedarmayanti. Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik antara lain studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, dengan fokus pada aparat KOPERIN DISDAG Kota Cimahi serta Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, Perbandingan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, Perbandingan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Perbandingan, Clean Government, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF CLEAN GOVERNMENT BETWEEN CIMAH I CITY GOVERNMENT AND WEST BANDUNG REGIONAL GOVERNMENT

Abstract

The bad image of governance characterized by practices such as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) has brought us to a period in Indonesian political history characterized by a spirit of reform. One of the central issues that emerged from this reform movement was the idea



of Good and Clean Government. This research uses Sedarmayanti's theory of good and clean government. There are four aspects, namely: transparency, accountability, community participation, and rule of law. The research design used in this research is qualitative using descriptive research methods. Data collection was carried out through techniques including literature study, observation, interviews and documentation. The selection of informants was carried out using a purposive technique, focusing on the KOPERIN DISDAG officials of Cimahi City and the Social Service of the Regional Government of West Bandung Regency. The results of the research show that the comparison of transparency in the Cimahi City Government and the West Bandung Regency Government is equally transparent to the public and the general public. The comparison of accountability in the Cimahi City Government and the West Bandung Regency Government is both in providing clear accountability for all government activities carried out. carried out in both regions, Comparison of community participation in the Cimahi City Government and West Bandung Regency Government, there is a slight difference in the percentage of community participants who are aware of the importance of democracy in the two regions through elections, and Comparison of the rule of law in the Cimahi City Government and West Bandung Regency Regional Government Both have corruption cases that occurred in both regions, indicating that the rule of law is still weak in the Cimahi City Government and the West Bandung Regency Government.

Keywords: Comparison, Clean Government, Cimahi City, West Bandung Regency

Pendahuluan

Pengelolaan pemerintahan suatu negara tidak terbatas pada badan pemerintahan pusat saja. Pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, pemerintahan daerah mengacu pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh PEMDA dan DPRD, berdasarkan prinsip tugas pembantuan dan otonomi, dengan fokus untuk menjamin otonomi yang paling menyeluruh dalam kerangka dan peraturan NKRI yang didirikan pada tahun 1945.

Konsep desentralisasi digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah. Hal ini melibatkan pendelegasian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengawasi dan mengendalikan urusan dalam negerinya. Dalam NKRI maksud dari daerah otonom berarti yang bertanggung jawab mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Lebih lanjut, pelaksanaan Dekonsentrasi melibatkan pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Gubernur, yang mewakili pemerintah, dan kepada lembaga-lembaga vertikal. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada berbagai daerah dan desa, mulai dari pemerintah provinsi, sampai ke kabupaten/kota, dan pada akhirnya sampai ke desa berupa tugas-tugas tertentu.

Konsep pemerintahan yang korup yang ditandai dengan tindakan Korupsi, Kolusi. Dan Nepotisme (KKN) telah mencetuskan era baru reformasi politik dalam sejarah Indonesia. Salah satu masalah utama yang sedang dibahas adalah konsep Good dan Clean Government. Istilah ini mendapat momentum di kalangan pejabat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan sebagai "pemerintahan yang baik". Meskipun demikian, sebagian fraksi yang lebih memilih menggunakan istilah asli, dengan alasan cakupan pemerintahan yang luas dan tidak dapat direduksi menjadi sekedar administrasi belaka. Untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan birokrasi adalah reformasi birokrasi (Kurniasih, 2017).

Penelitian ini menyelidiki meningkatnya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dari tahun ke tahun. Sikap antara pemerintah pusat dan

daerah terus terpecah. Para peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dampak penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam mengatasi masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menyangdingkan tingkat akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum antara Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat. Melalui analisis komparatif, Implementasi Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan semangat belajar peneliti, serta membantu Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong peningkatan kinerja serta penggunaan kewenangan yang beretika. Pada akhirnya, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kedua daerah dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perbandingan penerapan pemerintah yang bersih di antara kedua pemerintah daerah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi deskriptif. Penelitian deskriptif fokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian deskriptif dilakukan. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang objektif. Waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai Agustus 2023, berlokasi di dua daerah yaitu lokasi penelitian pertama di daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Perkantoran PEMKAB Bandung Barat Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah dengan Website <https://www.bandungbaratkab.go.id/>. Selanjutnya lokasi penelitian kedua di daerah Kota Cimahi khususnya di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No.1, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan Website <https://cimahikota.go.id/>.

Target atau subjek penelitian ini adalah aparatur dinas Disdagkoperin Kota Cimahi dan aparatur Dinsos Pemda Kabupaten Bandung Barat. Untuk menentukan objek penelitian dan sumber data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini melibatkan pemilihan sumber informasi berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan studi kasus yang diselidiki dan selaras dengan tujuan peneliti. (Sugiyono, 2013).

Perolehan data untuk penelitian ini dicapai melalui studi lapangan dan tinjauan literatur. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjaga integritas dan keandalan data yang dikumpulkan, digunakan teknik yang disebut triangulasi data. Metode ini melibatkan pemeriksaan silang data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan keakuratannya. Dalam hal ini, triangulasi data mengacu pada proses verifikasi informasi dari berbagai sumber melalui metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda-beda. Peneliti menggunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), yang merupakan analisis yang terdiri dari upaya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi atau perusahaan. Ada banyak sumber informasi eksternal tentang peluang dan ancaman.

Hasil Dan Pembahasan

Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan suatu daerah dapat dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya partisipasi masyarakat atas aspirasinya dapat dilihat dari jumlah angka partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu). Serta supremasi hukum Konsep negara hukum mencakup dua prinsip dasar. Pertama, hal ini dimaksudkan untuk mencegah individu yang mempunyai kekuasaan untuk mengeksploitasi kewenangannya. Kedua, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa individu tidak melakukan kegiatan di luar

batas hukum, yang dapat mengakibatkan kekacauan dan kekacauan. Hal ini memastikan bahwa individu dapat menggunakan haknya tanpa melanggar batasan hukum.

Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan clean government di Pemerintah Kota Cimahi telah mengadopsi prinsip transparansi dalam menjalankan clean government. Dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi, pejabat pemerintah lebih cenderung untuk bertindak dengan etika dan kepatuhan terhadap hukum karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka akan terlihat oleh publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan clean government di PEMDA Kabupaten Bandung Barat yaitu tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dalam pemerintahan memiliki peran krusial dalam suksesnya program dan proyek clean government.

Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bervariasi karena faktor seperti budaya, pendidikan, kesadaran, dan kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat melaporkan korupsi atau praktik tidak etis, membantu mengidentifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan. Informasi tentang kebijakan, program, dan proyek pemerintah harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, melalui situs web, publikasi, brosur, dan media lainnya. Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari adanya Pemilu. Pada Pemilu 2019, dengan angka partisipasi pemilih mencapai 87,6%, Cimahi telah menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap proses demokrasi. Di tengah kompleksitas dinamika politik dan sosial, angka ini benar-benar menggambarkan semangat kewarganegaraan yang kuat dan keterlibatan yang tinggi dari seluruh warga. Sedangkan partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengapresiasi kinerja KPU KBB atas raihan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 lalu yang mencapai angka partisipasi hingga 86%.

Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Supremasi Hukum

Kondisi penegakan hukum di Kota Cimahi dan KBB sudah bagus, hanya saja masih banyak oknum aparatur yang belum sadar akan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan terjadinya beberapa penyelewengan kekuasaan. Kerangka hukum yang jelas dan tegas terkait clean government memberikan dasar hukum bagi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Peraturan ini harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran prinsip clean government.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Perbandingan aspek transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum. Perbandingan aspek akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah. Perbandingan dalam aspek partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi

di kedua daerah lewat pemilu. Perbandingan dalam aspek supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya 103 supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.

Referensi

- Adisetiawan, R. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(3), 669-681.
- Bandung: Refika Aditama. hal 55 Sedarmayanti, Reformasi Administarsi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 276-283.
- Bappenas. 2004. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik.
- Frinady, B. 2018. Menuju Clean Government Dalam Negara Demokrasi. Diakses dari <https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/menuju-clean-goverment-dalam-negarademokrasi/>
- G.H Addink, 2003. "From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance", diktat Good Governance, hlm. 9. CLGS-FHUI, Depok.
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case. *Negara Hukum*, 9(1).
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- Kurniasih, D. (2017). Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung. *Jurnal Transformativ*, 3(1), 1-15.
- Muslih, N. P. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cimahi (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan, Bandung: CV. Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
- Santosa, P. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.
- Sastrawan, B & Nilam, C. Konsep Hukum Islam Dalam Menata Clean Government dan Good Government Di Indonesia.
- Siregar, Muhammad Arifin. 2008. Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Propinsi Bengkulu. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV
- Susetiawan. 1998. Clean Government dalam Wajah Birokrasi. UNISIANO.36/XX1/1V/
- Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2015), hal: 209,
- IAN. 2003. Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. hal 7
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- Wahyudi, I. 2022. Good Government dan Clean Government. Diakses dari <https://islamiccenter.uad.ac.id/go-od-government-dan-clean-government/>
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. 2014. Penguata Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Page: 120-138.
- Yunus, N, R. 2016. Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. Volume 3 Nomor 1 Internet